

BAB III

KONDISI UMUM PALEMBANG DALAM PERIODE 1900-1990 M

Uraian pada bab ini akan memaparkan mengenai kondisi sosial keagamaan dan pendidikan Islam di Palembang pada masa Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri hidup. Tepatnya antara pada tahun 1334-1411 H/1016-1990 M. jika menilik pada masa hidupnya, maka Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri telah mengalami masa kependudukan dari kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, masa Orde Lama, hingga pada masa Orde Baru. sehingga pembahasan dalam bab ini tidak akan jauh bahasannya mengenai kondisi sosial-keagamaan dan pendidikan Islam yang terjadi pada masa-masa tersebut.

A. Masuk dan Berkembangnya Islam di Palembang

Awal mula masuknya Islam di bumi Sumatera diperkirakan terjadi antara abad ke-7, hal ini berdasarkan dari hasil analisis dari sebuah seminar berjudul “Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan” yang dilaksanakan pada 29 November 1984 oleh Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang. Hasil dari seminar tersebut berkesimpulan bahwa Islam mulai masuk ke Sumatera Selatan, terkhusus di Palembang diperkirakan terjadi pada abad-abad awal Hijriyah.¹ Menurut pendapat Sayid Naguib Al-Attas, dua tempat di tepi Selat Malaka pada awal-awal abad ke-7 H yang menjadi tempat singgah para musafir yang beragama Islam adalah

¹Idrus al-Kaf, “Tasawuf di Sumatera Selatan dari Abad ke-18 Hingga Abad ke-21”, *JIA*, No. 1, (Juni 2019), h. 93.

Palembang dan Kedah. Disini mereka disambut baik oleh pemerintah lokal yang belum menganut Islam. Jika berdasarkan pendapat tadi maka pada awal-awal Hijriyah atau abad ke-7 M di Palembang sudah ada masyarakat Islam yang oleh pemerintah setempat (raja Sriwijaya) telah menerima dengan baik dan diperbolehkan beribadat menurut agama Islam.² Para pedagang muslim ini sambil menunggu angin musim untuk melanjutkan pelayaran, mereka tinggal dan membentuk sebuah komunitas masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat lokal sambil berdagang.

Datang dan berkembangnya Islam ke Nusantara terkhusus di Kota Palembang dilakukan dengan jalan damai, tidak seperti ketika agama Protestan dan agama Katolik yang datang dengan misi khusus kristinasinya.³ Tidak hanya itu, berkembangnya Islam juga dipengaruhi oleh bentuk dari kerajaan Sriwijaya yang pada masa itu berbentuk kosmopolitan, meskipun sriwijaya adalah sentral keilmuan agama Buddha yang terkenal di Nusantara. Azra berpendapat, sebagai ibukota Kerajaan Sriwijaya pada saat itu di Palembang sudah ada sejumlah muslim pribumi dari kalangan masyarakat kerajaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari interaksi antara penduduk setempat dengan musafir muslim dari Timur Tengah, terhitung sejak munculnya Islam.

Persebaran Islam di Palembang yang dilaksanakan melalui jalur damai berlangsung berdasarkan beberapa tahapan. Proses pengislaman ini dilaksanakan dengan beberapa cara, diantaranya menggunakan saluran perdagangan, perkawinan,

²K. H. O Gadjahnata dan Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera selatan*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 19.

³Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), h. 93-94.

maupun tasawuf. Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir semua ahli dan pengamat sejarah bersepakat, bahwa tahapan Islamisasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perekonomian khususnya perdagangan yang dilakukan pada saat itu. Adapun saluran-saluran Islamisasi di Palembang yakni seperti berikut ini.

Saluran pertama adalah melalui perdagangan. Islamisasi di sini sangat diuntungkan, karena menurut Islam tidak ada pembedaan antara para pedagang dengan agamanya dan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk menyampaikan ajaran kepercayaan kepada pihak-pihak lain.⁴ Dalam uraian ini, Van Leur berpendapat bahwa para penguasa lokal yang ingin mengembangkan kegiatan perdagangan mereka harus rela menerima Islam. Maka dari itu penguasa lokal akan mendapatkan dukungan lebih dari para pedagang muslim yang berkuasa terhadap sumber-sumber ekonomi. Sebaliknya, para penguasa memberikan perlindungan dan koneksi-koneksi dagang kepada para pedagang muslim. Dengan konversi mereka terhadap agama Islam, para pemerintah lokal dapat mengikuti keadaan secara lebih terpisah dan menguntungkan dalam perdagangan internasional.⁵ Tentunya orang-orang muslim tersebut yang berdiam di Palembang telah menggunakan saluran ini dalam rangka pengislaman penduduk setempat. Tujuan penting yang ingin dicapai oleh mereka adalah profit berbisnis maupun profit dalam pelaksanaan syariat Islam.

⁴Endang Rochmiatun, “Bukti-Bukti Proses Islamisasi di Kesultanan Palembang”, *Tamadun: Jurnal kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 17, No. 1, (2017), h. 2.

⁵Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), h. 13.

Saluran kedua adalah melalui perkawinan. Tampaknya, Sebelum agama Islam mendapatkan tempat di masyarakat pribumi para pedagang Muslim telah terlebih dahulu selama beberapa abad mendiami beberapa bagian Indonesia terutama didaerah-daerah pesisir. Sebagaimana kita ketahui selain berprofesi sebagai pedagang, orang Arab yang berdiam di Palembang diantaranya adalah berperan sebagai ulama. Hubungan para masyarakat muslim ini lama kelamaan menjadi intens, kemudian terjadilah perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal.

Saluran Ketiga adalah Pendidikan. Pendidikan juga memiliki peranan yang penting untuk pengislaman di nusantara. Mengikuti tuntutan zaman, maka perlu adanya wadah atau lembaga yang bisa menjadi penampung anak-anak mereka dalam mengembangkan atau mendalami ilmu keagamaan. Lembaga umum tersebut biasa memuat kebutuhan pendidikan antara lain, masjid, langgar, atau dalam komunitas yang lebih kecil, seperti keluarga.⁶

Saluran keempat adalah melalui tasawuf. Melalui tasawuf Islamisasi di Palembang berkembang cukup cepat sekali pada abad ke-18 M. Hal tersebut dibuktikan dengan berkembangnya sebuah Tarekat Sammaniyah di Palembang oleh Syaikh Abdus-Shamad al Palimbani (1704-1789). Banyak sekali masyarakat yang belajar kepada beliau, selain itu karya-karya intelektualnya juga beredar di daerah Palembang dan bahkan masih digunakan hingga sekarang.⁷

⁶Nor Huda, *Sejarah sosial Intekeltual Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 14-15.

⁷Endang Rochmiatun, “Bukti-Bukti Proses Islamisasi di Kesultanan Palembang”, *Tamadun: Jurnal kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 17, No. 1, (2017), h. 5-7.

Ketika kerajaan Majapahit cukup mendominasi di wilayah nusantara tak terkecuali wilayah Palembang, untuk pemimpin di daerah ini ditunjuklah seorang yang menjadi bupati Palembang yaitu Ario Damar. Ario Damar ini, menurut cerita merupakan seorang yang dipercaya oleh Prabu Brawijaya, untuk merawat anaknya bersama seorang putri dari Kamboja yang dikenal dengan nama Raden Fatah. Kemudian selanjutnya sejak permulaan Islam masuk ke tanah Jawa telah ada hubungannya dengan Palembang. Ario Damar pada saat itu memutuskan untuk memeluk agama Islam pula, berdasarkan ajakan dari Raden Rahmat ketika singgah di Palembang dan mengganti namanya menjadi Ario Abdillah (Ario Dillah). Maka sejak itulah Islam telah merambah ke kekuasaan elit.⁸

Perkembangan Islam selanjutnya yakni Kesultanan Palembang di samping melakukan Islamisasi dalam bidang politik, masa ini juga merupakan kemajuan Islam dari aspek ilmu pengetahuan. Masa ini lah sebenarnya permulaan tradisi intelektual Islam yang khas di Sumatera Selatan bermula. Lahirnya tradisi intelektual Islam ini dirintis oleh para ulama dan mendapat dukungan sepenuhnya dari para Sultan Palembang Darussalam tercatat sejak pengujung abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Oleh karena itu, tradisi keilmuan Islam di wilayah ini dimulai dari istana. Istana atau keraton Kesultanan Palembang Darussalam adalah pusat pengkajian Islam dan sastra di Palembang.

⁸Hamka, *Sedjarah Islam di Sumatera*, (Medan: Pustaka Nasional, 1950) , h. 14.

Munculnya istana sebagai inti pengajaran Islam dan sastra Melayu terutama disebabkan terjadinya kerjasama antar para sultan Palembang, yang menunjukkan minat yang besar terhadap kemajuan intelektual agama dan sastra, dengan beberapa ulama Palembang yang cukup produktif dalam menghasilkan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu-ilmu Islam dan sastra Melayu. Para sultan Palembang ini, sejak sultan pertama hingga sultan terakhir, mempunyai hubungan yang akrab dengan para ulama dan sebagian dari mereka menyokong para ulama istana dan penulis Palembang untuk melakukan penulisan karya-karya keagamaan Islam. Dari tangan para ulama dan penulis ini telah lahir lebih dari seratus tulisan dalam berbagai disiplin ilmu tradisional Islam (Tauhid, Tasawuf, Fikih, Tarikh, dan Ilmu Alquran), sastra Melayu, dan sejarah.⁹

Karena pusat pengembang ilmu agama Islam dan sastra Melayu adalah istana dan bukan lembaga pendidikan tradisional di tengah masyarakat yang terpisah dari istana, maka hingga keruntuhan Kesultanan Palembang. Berkembangnya Ilmu-ilmu Islam belum mampu banyak dirasakan masyarakat pribumi baik di Kota Palembang hingga wilayah pedesaan dan pedalaman Sumatera Selatan. Dijadikannya keraton/istana sebagai sentral kajian Islam dan sastra Melayu di Palembang, menurut Rahim, adalah ciri utama berkembangnya Islam yang membedakan wilayah ini dengan perkembang Islam di Barat dan Timur Tengah. Dengan kata lain, tradisi keilmuan Islam yang berkembang pada masa Kesultanan Palembang bersifat “istana-sentris”.

⁹Seno Hasanadi, *Perkembangan Pendidikan Islam di Kota Palembang*, (Padang: CV. Talao Sumber Rezeki, 2014), h. 30.

Sifat yang demikian ini tampaknya berimplikasi pada kesinambungan dan pemeliharaan tradisi keilmuan Islam di wilayah ini. Setelah runtuhnya Kesultanan Palembang, para ulama menurun drastis produktivitasnya, bisa dikatakan kegiatan mereka mengalami stagnan.

Lembaga pendidikan tradisional lainnya yang sering dipakai untuk tempat proses pendidikan Islam pada masa awal adalah langgar dan masjid. Langgar merupakan bangunan kecil yang digunakan untuk tempat ibadah sholat berjama'ah namun tidak digunakan untuk sholat jum'at dikarenakan daya tampungnya yang sedikit. Sementara itu masjid adalah bangunan yang daya tampung jamaah sholatnya lebih banyak sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan sholat Jum'at. Langgar atau masjid juga merupakan tempat belajar materi pelajaran agama Islam dasar ditambah pengenalan huruf Arab (*Hijaiyah*).

Disamping itu, masjid juga juga merupakan sebuah tempat untuk seorang anak melanjutkan pendidikan agama yang telah ia peroleh di rumah. Di sini anak yang sudah tamat megaji pada tingkat dasar bisa menueruskan pada tingkat selanjutnya yakni pengajian kitab diantaranya pelajaran Bahasa Arab, Fikih, dan Tauhid. Murid pengajian di tingkat pertama jumlahnya tidak banyak. Mereka ini biasanya menumpang di rumah *Lebai* penghulu dan ikut membantu tugas keluarga. Selanjutnya, di tingkat kedua diajarkan pendalaman kitab ditambah dengan Tafsir, Hadis, Tasawuf, dan Hisab.

Pada tingkatan kedua ini dilaksanakan di Masjid Agung Palembang oleh Khatib Imam dan Khatib Penghulu.¹⁰

B. Kondisi Sosial Keagamaan Palembang Pada Masa Kolonial

1. Sosial-Keagamaan Masa Kolonial Belanda

Standar gambaran umum kondisi sosial-keagamaan dimasa keresidenan Palembang pada masa itu hingga masa-masa selanjutnya dapat kita lihat melalui perkembangan tradisi keilmuan dan pengajaran agama. Hal itu disebabkan pada masa keresidenan lah Islam mulai berkembang luas tidak hanya dikalangan bangsawan tetapi juga berkembang secara luas ke seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan fakta sejarah, terbentuknya tradisi intelektualitas dan pendidikan agama Islam di Sumatera Selatan, khususnya Palembang di abad ke-18 saat Islam sudah berkembang dan menggantikan pengaruh kerajaan terdahulu yang bercorak Hindu-Budha. Hannya saja, pelaksanaan pendidikan ini berlaku khusus untuk kaum elit kekuasaan.

Setelah berakhirnya pemerintahan kesultanan Palembang, yang diawali dengan kekalahan Sultan Mahmud Badaruddin II saat berperang melawan kolonial Belanda pada 1823 M. Tradisi keilmuan melalui penulisan kitab-kitab keagamaan dan pendidikan agama, yang awalnya berlaku di lapisan masyarakat kaum elit kekuasaan, mulai menyusut. Seterusnya, tradisi pendidikan agama dikalangan masyarakat Palembang semakin menunjukkan peningkatannya.

¹⁰*Ibid.*, h. 34.

Menurut Husni Rahim, pada saat pendidikan Islam di masyarakat belum terlalu meluas, yang menjadi sentral pendidikan dan pengkajian Islam di Palembang adalah keraton. Kajian ini tentu hanya bisa dirasakan oleh kalangan kaum elit saja. Kalangan tersebut ialah semua para sultan Palembang, mulai sultan yang pertama hingga sultan yang terakhir misalnya sultan Ahmad Najamuddin II (1821-1825), dikenal memiliki kedekatan dengan para ulama bahkan selalu menyokong penulisan karya-karya bidang keagamaan Islam sampai berhasil memproduksi ratusan kitab dalam berbagai disiplin keilmuan tradisional Islam (Tauhid, Tasawuf, Fiqih, Tarikh, dan Ilmu Alquran).¹¹ Salah satu hasil kerjasama ulama dan penguasa setempat adalah lahirnya ulama-ulama tersohor yang aktif menghasilkan banyak tulisan seperti ulama bernama Faqih Jalaluddin yang mengajar ilmu Alquran dan Ushuluddin serta giat dalam berdakwah hingga ia wafat di tahun 1748 M. selain itu juga terdapat Syekh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad. Ulama lainnya adalah kemas Fakhrudin dan Abd Samad al-Palimbani dan lain sebagainya.¹²

Berdasarkan Laporan Tahunan Residen Palembang, tercatat sejak tahun 1830-an lebih-lebih tahun 1834, para ulama setempat mengeluhkan tentang berkurangnya minat dari masyarakat umat Islam dalam mempelajari dan ketekunan beribadah. Tetapi setelah tahun 1850 M, terjadi tanda-tanda yang menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam beribadah di Palembang. Bahkan

¹¹Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), h. 2.

¹²*Ibid.*, h. 3.

kalangan pegawai pemerintah kolonial Belanda membuat pandangan umum akan hal ini, bahwa penduduk kota Palembang sudah cenderung lebih saleh dan taat beribadah menunaikan kewajiban agama. Hanya saja, pihak kolonial Belanda tidak terlalu menggubris akan perkembangan Islam pada saat itu. Karena mereka, penguasa Belanda saat itu menganggap hal tersebut sebagai fanatik. Kegiatan keagamaan yang ada di Palembang waktu itu terbatas hanya melaksanakan ibadah seperti shalat Jum'at atau puasa Ramadhan. Tidak nampak perilaku subversive di tengah masyarakat, atau gerakan-gerakan yang kiranya dapat mengancam eksistensi kolonial Belanda.

Namun, tercatat pada 1880-an, sebutan fanatik belakangan mulai nampak, diantaranya disebabkan busana dan sikap keagamaan yang makin mencolok. Bisa dilihat dari para pemuka agama dan kelompok-kelompok haji yang kian banyak memakai setelan jubah panjang warna putih, melilitkan serban di kepala, dan tasbih di tangan. Tak hanya itu jamaah sholat Jum'at juga terlihat mulai berkembang pesat, sehingga sangking banyaknya gerombolan masa tersebut susah dalam melewati mereka yang hendak melaksanakan ibadah Jum'at. Situasi semacam ini tentunya belum ada di periode sebelumnya.¹³

Memasuki abad ke-20, seiring dengan meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap ajaran agama, mulai muncul usaha-usaha dari sebagian masyarakat muslim untuk memperkenalkan pembaharuan dalam pemahaman dan pengamalan Islam. Sebagaimana di berbagai wilayah Indonesia lainnya upaya pembaharuan Islam ini juga

¹³Jeroen Peters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius Islam di Palembang: 1821-1942*, (Jakarta: INIS, 1997), h. 6-7.

dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan yang diperkenalkan oleh Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha di mesir pada abad ke-18 dan 19. Upaya ini ditandai dengan pembukaan cabang organisasi Muslim pembaharu: Muhammadiyah dan al-Irsyad di sejumlah wilayah Keresidenan Palembang sejak 1926.

Bagaimanapun gerakan pembaharuan Islam oleh Muhammadiyah dan Irsyad merupakan tantangan terhadap Islam tradisional yang sejumlah besar dianut selama ini oleh masyarakat muslim Keresidenan Palembang, terutama mereka yang tinggal di Kota Palembang. Sebagaimana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, pembaharuan Islam yang dilakukan oleh *Kaum Mudo* telah memunculkan bibit-bibit konflik dalam pemahaman agama Islam diantara sesama masyarakat Muslim Keresidenan Palembang. Penelitian Peeters, yang mengkhususkan pada konflik antara kaum Muslim tradisional dan kaum Muslim reformis, mengungkapkan bahwa masuk dan berkembangnya gerakan pembaharuan Islam di wilayah ini telah menimbulkan ketegangan, insiden, dan friksi umat Islam luar biasa yang baru berakhir dengan skisma dalam bentuk pengelompokan yang disebut istilah *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo*. Riset awal yang dilakukan Peeters terhadap Surat Kabar *Pertja Selatan* mengungkapkan bahwa dalam periode 1928-1936 terjadi berbagai insiden antara pendukung *Kaum Tuo* dengan pendukung *Kaum Mudo*. Diantaranya adalah perkelahian di Masjid sekayu (April 1928), pertengkaran sekitar pembukaan Kantor Muhammadiyah di Pagaram (Maret 1929), rintangan pemerintah setempat atas penggunaan sekolah Al-Irsyad di Ranau (September 1929), pertengkaran sengit di Lahat karena pembukaan bioskop oleh *Kaum Mudo* di samping masjid milik *Kaum Tuo* (Mei 1930), dan intimidasi terhadap

anggota-anggota Muhammadiyah di Sirih Pulau Padang (April 1930). Dari pengamatannya didapati bahwa fenomena Islam di Keresidenan Palembang menunjukkan bahwa pembaharuan Islam lebih sukses di wilayah pedesaan daripada di Kota Palembang. Basis *kaum tuo* mewakili kelompok Islam tradisional-konservatif lebih eksis di perkotaan, dalam hal ini di kota Palembang sebagai pusat pemerintahan, dengan dukungan sebagian elit religius yakni: sayyid, ulama, priyai, dan penghulu.¹⁴

Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia ini, untuk pendidikan sekolah-sekolah yang dibangun sangatlah terbatas, dapat dikatakan tidak atau belum seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, meliputi kebijakan dan sarana yang diberikan. Ditambah lagi dengan tingkat perekonomian masyarakat Indonesia yang masih rendah, sehingga masih amat kecil di kalangan bumiputera yang mampu mengenyam dan meneruskan ke sekolah-sekolah bentukan Belanda. Berdasarkan hal tersebut, maka pilihan lain dari lembaga pendidikan yang lebih mampu dijangkau rakyat serta bersifat egalitarian adalah sistem pendidikan di pesantren, surau atau dayah, karena kaum muslim kala itu banyak memasukan anak-anak mereka ke tempat pendidikan ini. Pesantren dan semacamnya dari aspek sistem, metode, dan materi memiliki perbedaan dengan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah Belanda.¹⁵

¹⁴Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942*. (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), h. 64-65.

¹⁵Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prena Media Group, 2014), h. 31.

Sementara itu, kondisi pendidikan di kesultanan Palembang jika kita ketahui kala itu sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisional-lah yang menjadi jalur utama (*mainstream*) dalam dunia pendidikan di Sumatera Selatan, maka berbeda dengan masa pemerintahan Kolonial, pendidikan Islam banyak mengalami pembatasan di tengah-tengah masyarakat. Belanda lebih memperkenalkan Pendidikan modern dengan sistem barat yang mereka dirikan untuk menjadi pilihan utama di wilayah ini. Sejak awal abad ke-20, mau tidak mau masyarakat Sumatera Selatan mulai berfikir bahwa pendidikan Belanda itu penting, hal ini karena jika berhasil lulus di diploma Belanda maka kesempatan kerja akan terbuka lebar. Berdasarkan itu pula agaknya, masyarakat di awal abad ke-20 lebih cenderung memilih sekolah-sekolah bentukan Belanda daripada lembaga pendidikan Islam yang yang lebih banyak masih menggunakan sistem lama.¹⁶

Karena kebutuhan yang mendesak terhadap pendidikan belum dapat dipenuhi oleh pemerintah secara keseluruhan, maka sebagian masyarakat mempunyai inisiatif untuk mengusahakan berdirinya sekolah dengan sistem pendidikan seperti halnya sekolah pemerintah (sekolah partikelir). Disamping mendirikan sekolah-sekolah partikelir yang benar-benar murni seperti sekolah Belanda, sejak abad 20-an sebagian masyarakat Muslim juga ikut andil mendirikan sekolah-sekolah partikelir Islam (lembaga pendidikan Islam formal dan klasikal dengan sistem dan metode layaknya sekolah-sekolah Belanda). Dari sinilah kelak kebaruan dalam bidang pendidikan Islam dimulai. Disamping mengusahakan berdirinya sekolah-sekolah partikelir Islam

¹⁶Seno Hasanadi, *Perkembangan Pendidikan Islam di Kota Palembang*, (Padang: CV. Talao Sumber Rezeki, 2014), h. 43.

(umumnya dalam bentuk Madrasah), masyarakat Sumatera Selatan juga mempunyai tradisi mengirimkan para putranya belajar dan menuntut ilmu Islam ke Arab dan Mesir.¹⁷

Kemunculan sistem dan lembaga pendidikan Islam bersifat formal di Keresidenan Palembang tidak bisa dipisahkan dari usaha tokoh-tokoh dan organisasi Islam dalam melakukan pembaharuan sistem pendidikan Islam tradisional yang telah lama berada di masyarakat, baik di rumah, langgar, maupun masjid. Usaha awal dalam pembaharuan ini diperkirakan terjadi di permulaan abad ke-20.

Pada tahun 1925 di Palembang, baru muncul Lembaga pendidikan Islam dengan sistem klasikal dan formal selayaknya sistem sekolah pemerintahan dengan dibangunnya Madrasah Aliyah Diniyah di Kampung Sekanak, 28 Ilir. Pada tahun yang sama (tepatnya 8 Desember 1925) diluar kota Palembang (dipedesaan wilayah Iliran Palembang) dibangun sebuah lembaga pendidikan bernama Madrasah Islamiyah Di Tanjung Raja *Onder Afdeling* Komerling Ilir. Setelah itu menyusul beberapa madrasah lainnya di kota Palembang seperti Madrasah Al-Ihsan (sejak tahun 1927) dan Madrasah Arabiyyah (sejak 1926) yang bangkit kembali dengan sistem yang lebih modern. Masih di Kota Palembang, pada tahun 1926 didirikan pula Madrasah Qur'aniyah dikampung 15 dan 16 Ilir sebagai transformasi dari lembaga pendidikan Islam tradisional di rumah yang dimulai sejak 1924. Hingga awal 1940-an bermunculan berbagai lembaga pendidikan Islam Formal (sekolah partikelir Islam) di Kota Palembang sendiri maupun

¹⁷ *Ibid.*, h. 47.

di desa-desa di *Iliran* dan *Uluan* Palembang. Lembaga tersebut mayoritas berupa madrasah dan sebagian kecil berupa sekolah umum atau sekolah Islam yang dibangun oleh organisasi maupun inisiatif perorangan. Pada wilayah Keresidenan Palembang ada tiga tingkatan pendidikan Islam, *pertama* tingkat pra sekolah dasar, *kedua* tingkat dasar (sekolah rendah), dan *ketiga* tingkat menengah. Tetapi, yang awal-awal dibangun yakni lembaga-lembaga pendidikan di tingkat dasar, sedangkan tingkat selanjutnya di bangun menyusul.¹⁸

2. Sosial-Keagamaan Masa Pendudukan Kolonial Jepang

Pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Disusul dengan pernyataan dari komandan pasukan Belanda yang menyerah kalah kepada Jepang tanpa perlawanan berarti. Selanjutnya Pada tanggal 24 Januari 1942 Balikpapan yang juga merupakan sumber minyak jatuh ke tangan pasukan Jepang.

Setelah berhasil merebut kota kaya minyak itu, Jepang mengerahkan perhatiannya ke selatan, menyerang Banjarmasin Tanggal 10 Februari 1942. Pasukan Jepang juga menguasai kota-kota Sumatera yang juga merupakan sumber minyak. Dalam menghadapi agresi Jepang, pihak sekutu membentuk komando bersama yang dinamai *American British Dutch Australian Command* dibawah komando Jenderal Sir Archibald Wavell yang bermarkas besar di Lembang, Jawa Barat. Sedangkan Letnan Jenderal H. Ter Poorten diangkat sebagai komandan tentara Hindia Belanda (KNIL).

¹⁸Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942*. (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), h. 95.

Pihak pasukan sekutu berusaha mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Jepang yang berada dibawah komando Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Jumlah pasukan Jepang yang menyerbu P. Jawa lebih besar dibandingkan kekuatan pasukan sekutu. Dalam waktu singkat seluruh pulau Jawa diduduki oleh Jepang . pada tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di tiga wilayah yaitu Teluk Banten, di eretan (Jawa Barat), dan Krangan (Jawa Tengah).

Pasukan militer Belanda kerepotan dalam menghalau dan menghentikan gempuran pasukan militer Jepang. Hingga Pada tanggal 6 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten memerintahkan agar tidak melakukan pertempuran di kota Bandung jika tidak mau menyerahkan secara total kekuasaan wilayah Hindia Belanda. Pihak Belanda awalnya berusaha mengatur waktu. Namun, karena tekanan dan ultimatum, akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang.¹⁹ Pada setiap wilayah kedudukannya Jepang membangun beberapa instalasi militer. Persebaran instalasi militer di Hindia Belanda, berkaitan erat dengan upaya Jepang dalam mendirikan kekaisaran di Asia dan ambisinya dalam menguasai bahan-bahan industri yang terdapat di sebelah selatan Jepang termasuk Hindia Belanda. Palembang termasuk di dalam wilayah pendudukan Jepang (14 Februari 1942) karena merupakan salah satu wilayah asset pengumpulan minyak dari seluruh wilayah Sumatera selatan dan dimanfaatkan sebagai penyuplai kebutuhan perang Jepang melawan sekutu.²⁰

¹⁹Abdul Irsan, *Jepang Politik Domestik Global dan Regional*, (Makassar: Hasanuddin Press, 2005) hal., 137.

²⁰Muhammad Riyad Nes, “Tipologi Instalasi Militer Jepang di Kota Palembang, Sumatera Selatan”, *Siddhayatra*, Vol. 23, No. 2, (2018), h. 103.

Propaganda merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan pendudukan Jepang atas Indonesia, karena pada waktu itu propaganda dijadikan sebagai usaha dalam menarik kerjasama dengan rakyat dan juga merupakan sebagai usaha Jepang dalam mengendalikan perlawanan rakyat.²¹ Jepang meluncurkan proyek propagandanya yakni “gerakan 3A” yaitu sebuah semboyan yang berisikan “Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia”, pada april 1942 dan membentuk *Sendenbu* (departemen propaganda) pada Agustus 1942. *Sendenbu* dibentuk guna mencukupi kebutuhan Jepang dalam dalam mendapatkan simpati rakyat Indonesia.²² Jepang melancarkan Propagandanya tidak hanya kepada masyarakat awam di Indonesia saja tetapi juga melancarkan propagandanya terhadap umat Islam. *Pertama*, bersinergi dengan kegiatan keagamaan yakni melakukan pendekatan khusus terhadap Umat-umat Islam. *Kedua*, Pendekatan terhadap pemuka agama Islam yakni para pembesar Agama Islam yang disebut dengan *Ulama*. *Ketiga*, Disamping mendekati umat Islam Melalui para tokohnya, Pemerintah militer Jepang juga melakukan pendekatan melalui pembuatan kebijakan yang populis terhadap pendidikan Islam. *Kempat*, Pembentukan lembaga-lembaga untuk kaum Islam.²³

²¹itin Apriani Putri, “Propaganda Jepang Dalam Melancarkan Kebijakan Pendudukan Di Indonesia Tahun 1942-1945”, *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2018, hal., 18.

²²Shafaat Rouzel Waworuntu, “Representasi Propaganda Pendudukan Jepang di Indonesia”, *JSRW (Jurnal Senirupa Warna)*, Vol. 8, No. 2, (Juli 2020), h. 7.

²³Tendi, “Propaganda Terhadap Umat Islam di Zaman Jepang”, *Tamadun*, Vol. 6, No. 1, (Januari-Juni 2018), h. 72-73.

Ketika agama Islam diakui sebagai agama resmi dalam sistem Kesultanan Palembang, maka seluruh penduduk kota dan wilayah sekitarnya memeluk agama tersebut, walaupun di zaman kolonial Belanda perkembangannya selalu saja diawasi. Berbeda dengan zaman pendudukan pemerintahan Jepang, para pemuka agama hampir selalu mendapat perhatian khusus, yaitu menggunakan pengaruh mereka untuk menyampaikan kepentingan Jepang sama halnya dengan di daerah lain seperti di Jawa. Seperti contohnya saat pasukan tentara Jepang menguasai wilayah ini, Jepang memanfaatkan salah seorang tokoh politik Islam yang bernama A. S Mattjik yang selalu saja diajak Jepang ke daerah-daerah dalam mendapatkan perhatian masyarakat, demi menunjukkan eksistensi mereka disini sebagai pendukung orang muslim.

Setelah pemerintah militer Jepang mulai stabil di wilayah ini, maka para pemuka agama di daerah Uluu saja diundang pada pertemuan-pertemuan resmi, dengan tujuan agar para pemuka agama lebih ikut andil dalam memberikan informasi kepada penduduk setempat. Hal ini bukan tanpa tujuan, bahwa dalam menyirikan masyarakat di daerah ini, para pemuka agama menunjukkan kedudukan sebagai komunikator antara tradisi kecil (tradisi lokal) dengan tradisi besar (agama Islam). Kelompok ini memiliki identitas yang sama dengan petani pada umumnya, sehingga mempunyai lebih banyak alat komunikasi dengan rakyat pedesaan. Melalui sistem penggajian, sistem tarikan atau sistem pesantren, kelompok ini dapat melakukan

pengawasan pada masyarakat-agraris, dan dengan ini cara mudah dapat mengendalikan penduduk.²⁴

Peranan kelompok ini tidak bisa diragukan dalam sejarah perkembangan di wilayah tersebut, sebab pada umumnya protes sosial pada pemerintahan kolonial terdahulu dikepalai oleh kelompok tersebut. Permasalahan seperti ini menjadi fokus utama pemerintah Jepang, biarpun dalam seluruh usaha Jepang tidak berupaya untuk membina kehidupan agama. Sebaliknya pemerintah Jepang selalu memanfaatkan pengaruh para pemuka agama dalam menggerakkan umat Islam supaya mau berkorban dalam memberikan bantuan moral serta materil terhadap Jepang. Awalnya Jepang melegalkan sekolah-sekolah yang bercorak Islam. Namun kemudian setelah diadakannya konferensi umat Islam se-Sumatera Selatan di Tanjungraja, maka barulah golongan ini mencurigai perilaku Jepang selama ini, karena mereka mengharuskan untuk melakukan upacara penghormatan terhadap *Tenno Heika* ke setiap sekolah yang identik dengan gerakan sembahyang dalam Islam.

Jepang juga menekankan kepada umat Islam untuk bersedia “jihad fisabilillah” melawan sekutu. Anjuran yang terkesan memaksa ini sudah pasti tidak bisa diterima mentah-mentah, sehingga berdampak pada dihentikannya semua kegiatan sekolah-sekolah agama, dan yang paling penting sikap golongan kyai/pemuka agama setempat

²⁴Makmun Abdullah, dkk., *Kota Palembang Sebagai Kota Dagang dan Industri*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), h. 115.

kurang menunjukkan rasa simpatiknya terhadap Jepang. Uluran tangan dan sikap menerima dengan baik terhadap Jepang yang diberikan oleh orang Islam selama ini, mulai dipertanyakan oleh mayoritas penduduk, paling utama mengenai perlakuan orang-orang Jepang yang merampas hak milik tani rakyat, perlakuan terhadap pekerja paksa (kuli BPP) diluar perikemanusiaan dan juga tindakan mengumpulkan anak-anak gadis di wilayah pedusunan. Anjuran yang datang dari pemerintah militer Jepang setempat untuk mengumpulkan anak-anak gadis dengan iming-iming yang muluk-muluk, telah memunculkan keadaan yang penuh rasa ketakutan.

Pada situasi ini beberapa orang tua berpikiran untuk menikahkan anak-anak gadisnya dalam waktu yang belum direncanakan. Pada masa akhir pendudukan militer Jepang di wilayah ini, tidak sesuai dengan janji yang mereka gaungkan sebagai “juru selamat”. Dengan demikian perkembangan terakhir mengenai sikap militer Jepang terhadap para Ulama/ pemuka agama merupakan puncak tertinggi dari suatu hubungan yang dekat menjadi pudar dan penuh penyesalan.²⁵

Untuk Pendidikan pada awal kedatangan Jepang ke Palembang, pendidikan yang diberlakukan saat itu adalah dengan meneruskan pendidikan yang sudah ada sebelumnya, yakni memakai sistem pendidikan ala barat di masa pendudukan Belanda. Selanjutnya Jepang mengatur ulang dengan memasukan doktrin Asia Raya agar sesuai dengan maksud dan tujuan mereka. Pendidikan dari masa Belanda dirubah total,

²⁵*Ibid.*, h. 117.

dikarenakan pada masa pendudukan Belanda di Palembang yang berhak mendapatkan pendidikan hanya golongan pilihan saja, yaitu kaum elit alasannya karena golongan elite bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat serta memerintahkan rakyatnya agar tunduk kepada Belanda. Maka di pendudukan Jepang, mereka meminta kepada seluruh rakyat Palembang supaya mau membantu Jepang menang dalam perang. Oleh sebab itu mereka memberikan pendidikan kepada semua rakyat Sumatera Selatan khususnya Palembang.²⁶

Sistem pengajaran lama yang dipakai oleh Jepang ditambahkan beberapa mata pelajaran, yaitu pendidikan bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib dan huruf Jepang hingga sikap badan (*taisho*) dalam kurikulum. Sedangkan Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sebelum pelajaran diawali para murid digiring untuk upacara penaikan/ pengibaran bendera *Hinomaru* sambil menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (*Kimigayo*), menghormat (*seikerei*) kepada kaisar Tenno Heika di Tokyo dengan menundukan setengah badan menjadi 90°, mengucapkan sumpah setia kepada *Tenno* dan kemudian diteruskan gerak badan (*taisho*).²⁷

²⁶Pandu Wiranata, dkk., “Perkembangan Pendidikan di Palembang Pada Tahun 1942-1950 (Sumbangan Materi Pembelajaran Mata Kuliah Sejarah Pendidikan)”, *Artikel*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, h. 7.

²⁷Makmun Abdullah dkk., *Kota Palembang Sebagai Kota Dagang dan Industri*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), h. 113.

Pendidikan pada masa pendudukan Jepang ini digolongkan menjadi sekolah dasar, yakni berbagai macam sekolah dasar yang digelar pada jaman pendudukan kolonial Belanda, baik yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, maupun yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dilebur menjadi satu jenis sekolah rendah (S.D.), yakni sekolah rakyat 6 tahun yang dalam bahasa Jepang disebut *Kokumin-Gakko*. Pendidikan kejuruan di Palembang, dibentuklah oleh Jepang membentuk sekolah-sekolah kejuruan yang diselaraskan dengan tujuan Jepang sendiri, sekolah tersebut seperti: Sekolah Guru, Sekolah Pegawai Negeri, Sekolah Keputrian yang murid-muridnya berasal dari golongan elit, dan sekolah *Mizuho-Gakko-en*.²⁸

C. Kondisi Sosial Keagamaan Palembang Pada Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, perencanaan-perencanaan yang sempat belum terlaksana dan terbatasnya masyarakat dalam mendapatkan ilmu agama akhirnya dapat berjalan secara normal lagi. Kegiatan belajar mengajar baik di masjid-masjid, mushola, atau majelis-majelis taklim yang ada di Palembang berjalan seperti biasa kembali. Pelajaran-pelajaran bela negeri dan bela bangsa semakin banyak diajarkan. Hal ini mungkin karena sisa-sisa semangat kemerdekaan yang masih hangat-hangatnya di masyarakat Palembang saat itu.

²⁸*Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan*, (Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Investasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985), h. 60-62.

1. Kondisi Sosial Keagamaan di Palembang Masa Orde Lama

Permulaan tahun 1960-an, setelah kemerdekaan Indonesia disaat kondisi sosial-keagamaan yang damai diumumkan tahun 1945, tercurahkan ide-ide Presiden pertama Soekarno tentang Nasionalisme, Agama dan Komunisme. Munculnya ide itu merupakan kecemasan terhadap ancaman perpecahan bangsa jika ketiganya tidak dituntaskan. Seperti itulah juga yang dialami Kota Palembang kala itu. Palembang tidak luput dari maraknya pertumbuhan paham komunisme, namun semua itu dapat diatasi dengan apik oleh para ulama-ulama setempat yang sebagian besar tergabung di organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang menolak gerakan komunisme.

Sehingga masyarakat dan para ulama yang ikut di dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan juga ikut serta mengatasi gerakan tersebut. Dampaknya adalah semakin meningkatnya perilaku keagamaan yang digalakkan oleh para pemuka agama setempat. Sama seperti di seluruh wilayah lain di Indonesia, keadaan Sosial-Keagamaan Kota Palembang juga pernah gempar oleh kabar komunisme, tetapi semua itu bisa diatasi secara apik melalui kerjasama dan komunikasi yang mantap antara masyarakat dan para pemuka agama.

2. Kondisi Sosial Keagamaan di Palembang Masa Orde Baru

Permulaan tahun 1960-1970-an M, penduduk yang tinggal di kota besar seperti Kota Palembang dan wilayah Uluhan khususnya, sadar bahwa mereka tinggal dalam sebuah masyarakat yang majemuk dan beragam. Banyak sekali perbedaan nilai budaya, norma maupun aturan-aturan yang berlaku sehingga mau tidak mau masyarakat yang waktu

itu menetap di tengah banyak perbedaan itu, harus beradaptasi dengan tempat mereka tinggal. Perselisihan antar etnis pada umumnya menyadarkan masyarakat, terutama mereka masyarakat pendatang untuk selalu melakukan adaptasi diri terhadap penduduk pribumi, atau dengan masyarakat lainnya.²⁹

Pada periode selanjutnya sekitaran tahun 1970-1980-an M, konsep perselisihan yang mendasar di kehidupan sosial masyarakat banyak dilaksanakan oleh masyarakat setempat, paling utama interaksi yang terangkai antara penduduk asli dengan warga pendatang. Peranan tetangga, yang mana dalam ajaran Islam dianjurkan untuk mendahulukan tetangga dekat daripada saudara yang jauh, dipraktikkan dengan baik dan bijak. Sebab itulah, setiap masalah yang timbul dalam sebuah keluarga, maka tetangga dekatlah yang terlebih dahulu datang untuk membantu. Sama halnya seperti yang terjadi pada hari-hari raya keagamaan tiba yakni Lebaran dan Natal. Saat hari raya lebaran misalnya, pemerintah setempat, entah itu pengurus RT, RW, hingga Camat, mengadakan acara halal bihalal dan mengundang seluruh warga tanpa memperbedakan agama dan suku. Semua bergaul dan berkomunikasi dengan bebas, sebab menggunakan bahasa Indonesia.³⁰

Pada penghabisan masa Orde Baru, sekitar dasawarsa 1980-1990 M, kebanyakan aspirasi dan kehidupan sosial-keagamaan para umat Islam waktu itu sedang beranjak ke tujuan spektrum baru yang lebih menonjol bersifat kebudayaan

²⁹Zusneli Zubir & Seeno, *Jakabaring; Seberang Ulu Palembang tahun 1972-2011*, (Padang; Balai Penerbitan Nilai Budaya Sumatera Barat, 2016), h. 172.

³⁰*Ibid.*, h. 173.

daripada politik.³¹ Seperti halnya yang berlaku pada masyarakat Kota Palembang kala itu. Kepemimpinan oleh seorang Presiden Soeharto kala itu diartikan oleh masyarakat sebagai kekuatan perubahan keagamaan ke arah baru dan sudah condong ke arah kebudayaan Islam yang harus digalakkan.

Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada zaman kemerdekaan dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga dikelola oleh departemen-departemen lainnya seperti: Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Agama dan lain-lain. dalam Departemen Agama di Provinsi Sumatera Selatan terdapat bidang Pendidikan Agama Islam yang mempunyai tugas untuk mengawasi, membina dan mengelola Pendidikan Agama Islam di daerah ini. Sekolah-sekolah yang dibawah Departemen Agama (Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera selatan) antara lain *Madrasah Ibtidaiyah negeri* (MIN), *Madrasah Tsanawiyah Negeri* (MTsN) *Madrasah Aliyah Negeri* (MAN).³²

a. Madrasah Ibtidaiyah negeri (MIN)

Lembaga pendidikan madrasah yang dibangun dan dirintis oleh Nizam El-Mulk yakni menteri dari dunia Arab pada abad ke- 11, agaknya diperkenalkan pula dan berkembang di Indonesia. Untuk *Madrasah Ibtidaiyah negeri* (MIN) setingkat dengan sekolah dasar di Palembang setelah kemerdekaan

³¹Muh. Syamsuddin, "Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru", *Jurnal Dakwah*, Vol. XI , 2010, h. 3.

³²*Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan*, (Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985), h. 78.

perkembangannya terhitung sangat pesat, dan pada saat ini tercatat lebih kurang 120 Madrasah Ibtidaiyah, diantaranya terdapat 14 buah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), hampir pada tiap kabupaten/ kotamadya memiliki sekurang-kurangnya sebuah MIN yaitu: Kotamadya Palembang 2 buah, Musi Banyuassin 1 buah, Ogan Komering Ilir 1 buah, Lematang Ilir Ogan Tengah 3 buah, Lahat 1 buah, Ogan Komering Ulu 3 buah, Musi Rawas 1 buah, Bangka 1 buah, Kotamadya Pangkal Pinang 1 buah.

b) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)

Menurut data dari laporan-laporan Kantor Departemen agama Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pendidikan Agama Islam bahwa madrasah-madrasah di daerah ini pada umumnya berstatus swasta, baru kemudian kira-kira 1967 atas permohonan madrasah-madrasah bersangkutan kepada Menteri Agama Republik Indonesia mereka dinegerikan. Dan menurut laporan tahunan dari Bidang Pendidikan Agama Islam (1978-1980), hannya dua buah kabupaten dari sepuluh buah kabupaten/kotamadya dalam wilayah Provinsi Sumatera selatan yang belum memiliki Madrasah Tsanawiyah Negeri yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Bangka. Sedangkan 8 kabupaten/kotamadya lainnya minimal telah mempunyai sebuah MTsN. Untuk seluruh Provinsi Sumatera selatan tercatat sebanyak 16 buah Madras Tsanawiyah Negeri, yang pada umumnya baru pada 1968 dinegerikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

c) Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Disamping Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan juga mengasuh Madrasah Aliyah, yang menurut laporan tahunan 1979-1980 dari Bidang Pendidikan Agama Islam seluruh Provinsi Sumatera selatan sebanyak Sembilan buah Madrasah Aliyah Negeri. Dari 10 buah kabupaten/ kotamadya tiga buah yang belum mampu mempunyai Madrasah Aliyah Negeri yaitu; Bangka, Pangkal Pinang, dan Belitung.³³

d) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri

Pendidikan Islam di Provinsi Sumatera Selatan terkhusus Kota Palembang juga berdiri Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang mana semua ini berhubungan erat dengan pelaksanaan Muktamar Ulama se-Indonesia yang dilakukan di Palembang, di tanggal 09 s.d. 11 September 1957. Muktamar dihadiri hampir seluruh ulama se-Indonesia, yang bertujuan mengumpulkan pendapat perihal permasalahan yang terjadi di umat Islam Indonesia di berbagai segi kehidupan, mulai dari keagamaan, politik, sosial, pendidikan, budaya dan ekonomi.³⁴

Di tengah-tengah kegiatan Muktamar, muncul ide cemerlang dari tiga ulama Sumatera selatan, yaitu K. H. A. Rasjid Siddik, K. H. Husin Abdul

³³*Ibid.*, h. 78-89.

³⁴Ari Susanto, dkk., *Perjalanan Transformasi IAIN Menjadi UIN Raden Fatah Palembang*, (Palembang: 2017), h. 2.

Mu'in, dan K. H. Siddik Adim. Mereka melontarkan ide pendirian perguruan tinggi Islam yang selama ini diinginkan masyarakat Sumatera Selatan. Gagasan itu dukunga dari semua peserta Mukthamar dan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari terakhir Mukthamar, Rabu 16 Safar 1377 H, bertepatan dengan 11 September 1957 M, dilakukan peresmian pendirian Perguruan Islam Tinggi Sumatera selatan (PITSS). Realisasi dari pembukaan tersebut segera dibuka Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat yang masih berstatus swasta. Lalu dipilih pemimpin kelembagaan yang diketahui oleh K. H. A. Gani Sindang dengan sekretarisnya yang bernama Muchtar Effendi.

Setelah terbentuknya Perguruan Islam Tinggi Sumatera selatan (PITSS), sembilan bulan kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera Selatan (YPTISS) Berakte Notaris No. 49 tanggal 16 Juli 1958.

Pada tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Perguruan Islam Tinggi Sumatera selatan (PITSS) berstatus negeri dan menjadi Fakultas Syariah Negeri cabang dari IAIN Yogyakarta. Dekan pertamanya diangkatlah K. H. Abubakar Bastari yang menjabat sampai tahun 1962. Para staf dan pimpinan PITSS terus memperjuangkan peningkatan status kelembagaan agar kelak berdiri sendiri. Langkah yang diambil adalah dengan melepaskan diri dari IAIN Yogyakarta dan beralih ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1943. Setelah

perjuangan beberapa tahun akhirnya dengan berhasil melengkapi persyaratan menjadi institut, akhirnya pada tanggal 13 November 1964 secara formal diresmikan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang.³⁵

Pekembangan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Selatan terkhusus di daerah Kota Palembang dari awal masuknya Islam hingga masa pasca kemerdekaan Indonesia memang mengalami pasang surut mengikuti tragedi-tragedi yang terjadi di bumi Sriwijaya ini. Seperti halnya pada masa awal masuknya Islam dakwah dilakukan dengan melalui tiga saluran yakni perdagangan, perkawinan, tasawuf. Kemudian dilanjutkan pada masa kesultanan dakwah dan pendidikan Islam mengalami kemajuan dengan Istana/ Keraton menjadi pusat pengajaran, pengkajian Islam dan sastra di Palembang. Pada masa keresidenan Palembang terjadi perbedaan pemahaman dari golongan ulama *kaum tou* dan golongan ulama *kaum mudo* yang menghendaki pembaharuan yang berakibat pada terpisahnya basis dakwah dan pendidikan Islam di antara keduanya dimana untuk *kaum tuo* berbasis di wilayah Kota Palembang sedangkan *kaum mudo* berada di uluan Sumatera selatan. Pada masa Jepang dakwah dan pendidikan Islam pada awalnya sangat didukung oleh Jepang. Hal ini dikarenakan Jepang hendak mengambil hati masyarakat dengan mendekati para ulama dengan melakukan propaganda-propagandanya namun setelah itu keburukan dari Jepang akhirnya tercium oleh para ulama dan masyarakat sehingga para ulama tidak lagi

³⁵*Ibid.*, h. 3.

bekerjasama dengan Jepang. Dakwah dan pendidikan Islam mulai mengalami peningkatan yang signifikan pasca kemerdekaan Indonesia dimana contohnya dapat kita lihat dari pendidikan Islam di Kota Palembang dengan didirikannya lembaga pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, hingga perguruan tinggi seperti Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan (PITSS), Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera Selatan (YPTISS), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang.